



Bidang Perikanan Tangkap

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang
Perikanan Tangkap

Rekomendasi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup (SIKPI-I-PT)

No. SK : 188.4/2278/120.1/2022

Persyaratan

1. Scan Asli SIUP bidang perikanan tangkap
2. Scan Asli (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab badan usaha / perusahaan dimisili Provinsi Jawa Timur
3. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Scan Asli Gross akte untuk kapal ukuran GT.7 sampai dengan 30 (tiga puluh), dengan menunjukkan aslinya
5. Scan Asli Pas Besar untuk kapal ukuran GT.7 sampai dengan 30 (tiga puluh), dengan menunjukkan aslinya
6. Scan Asli Spesifikasi teknis & design palkah/ ruang penyimpanan ikan di kapal
7. Scan Asli Surat keterangan kelayakan kapal
8. Scan Asli daftar isian kapal
9. Foto kapal tampak depan, kiri, kanan, belakang
10. Scan Asli Surat pernyataan kebenaran dan bermaterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan Permohonan di Aplikasi "SIRIP"
2. Pemohon Melengkapi berkas permohonan melalui aplikasi "SIRIP".
3. Cabang Dinas Melakukan Verifikasi Berkas Permohonan
4. Bidang Tangkap Memeriksa kelengkapan dokumen hasil verifikasi dari cabang dinas
5. Bidang Tangkap menerbitkan rekomendasi
6. Rekomendasi SIUP Tangkap baru diupload pada Aplikasi "SIRIP"

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif



Bidang Perikanan Tangkap

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang
Perikanan Tangkap

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi SIKPI-I-PT Baru

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

1. Aplikasi SP4N Lapor Pusat : lapor.go.id
2. Email : bisikanla@gmail.com
3. Website : <https://dkp.jatimprov.go.id/>
4. Nomor WA : 08113190405

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
 2. Cek lapangan
 3. Koordinasi internal / eksternal
- c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada